

INDEPENDENSI HARIAN UMUM SINGGALANG DALAM KOMUNIKASI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI SUMATERA BARAT

Edi Saputra

Dosen UPT-MKU Universitas Negeri Padang
edi_saputra@yahoo.co.id

ABSTRACT

There had been some significant improvements made in the process of political communication during Pilkada (governor election) 2005 in West Sumatera. The fluency of political communication process was influenced by the independency of news paper including Harian Umum Singgalang as one medium to convey ideas, statement, and political messages given by the Pilkada's candidate (cagub/cawagub). The independency of news paper was determined through its "Tajuk Rencana". In the "Tajuk Rencana", the editor was free to convey the ideas and thoughts without being influenced by any other parties, especially by the candidates. The news paper roled neutral by clearly extending the society perspective related to the problems ocured in the Pilkada. Therefore, the news paper had roled as a political communication medium which acted independently to succeed the process of democracy in the Pilkada of 2005 in West Sumatera.

Keywords: *Independency, political communication, Regional Head Election*

ABSTRAK

Ada beberapa perbaikan yang signifikan yang dibuat dalam proses komunikasi politik selama Pilkada (pemilihan gubernur) 2005 di Sumatera Barat. Kelancaran proses komunikasi politik dipengaruhi oleh independensi surat kabar Harian Umum Singgalang termasuk sebagai salah satu media untuk menyampaikan ide, pernyataan, dan pesan-pesan politik yang diberikan oleh Pilkada itu calon (cagub / cawagub). Independensi surat kabar ditentukan melalui "Tajuk Rencana". Dalam "Tajuk Rencana", editor bebas untuk menyampaikan ide dan pemikiran tanpa dipengaruhi oleh pihak lain, terutama oleh candidates. Kertas berita pengerolan netral jelas memperluas perspektif masyarakat terkait dengan masalah terjadi dalam Pilkada. Oleh karena itu, surat kabar telah pengerolan sebagai media komunikasi politik yang bertindak secara independen untuk mensukseskan proses demokrasi di Pilkada 2005 di Sumatera Barat

Kata Kunci: *Independensi, komunikasi politik, Pilkada*

A. Pendahuluan

Komunikasi politik merupakan bagian terpenting dan tak dapat dipisahkan dari kegiatan dan proses politik.

Keterampilan komunikasi politik juga dapat menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan bagi

kesuksesan seorang aktor politik di panggung politik. Dalam komunikasi politik sekelompok orang (partai politik) dengan segala struktur yang tersedia menjalankan fungsi mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Komunikasi politik tersebut dapat berbentuk penyampaian pesan-pesan yang berdampak politik dari sekelompok orang ataupun pemerintah kepada rakyat ataupun sebaliknya.

Menurut Lasswell¹ cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan mendasar; *who says what in which channel to whom with what effect?*. Laswell ingin menyebut komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Sedangkan politik menurut Nimmo² merupakan kegiatan yang secara kolektif mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik sosial. Setiap manusia, dipandang Nimmo selalu berbeda dan hal itu yang menyebabkan konflik. Manusia berselisih, memperkenalkan masalah dan menyelesaikannya, maka itulah politik. Lebih jauh, Nimmo memberikan kesimpulan pandangan Mark Roelofs bahwa “komunikasi meliputi politik”. Bila orang mengamati konflik, mereka menurunkan makna perselisihan itu melalui komunikasi.

¹ Dalam Effendy, Onong Achjana. 2004. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.

² Nimmo, Dan. 1993. *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.

Dari dua pengertian kata di atas dapat dikatakan bahwa komunikasi politik adalah komunikasi yang bercirikan politik yang terjadi di dalam sebuah sistem politik. Komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan-pesan politik terutama pesan-pesan yang dilambangkan dengan menggunakan bahasa dalam arti yang luas. Pesan-pesan yang dimaksud adalah pesan-pesan yang menggunakan elemen bahasa seperti lagu, berita, informasi, pernyataan yang berkaitan dengan sistem nilai kepercayaan dan pendapat serta bisa juga bentuk interpretasi dan kritik.

Harold Laswell³ mengatakan bahwa komunikasi dalam artikulasi politik tidak terlepas dari persoalan “*siapa yang mengatakan apa, “melalui media mana”, ditunjukan kepada siapa, dengan pengaruh yang bagaimana*”. Dengan demikian, dalam komunikasi politik salah satu medianya adalah surat kabar yang menyalurkan “*siapa yang menyampaikan apa, ditunjukan kepada siapa dan dengan pengaruh yang bagaimana*”.

Penelitian ini ingin mengungkapkan bagaimana independensi Harian Umum Singgalang dalam komunikasi politik pada Pilkada di Sumatera Barat, khususnya pada Pilkada Cagub/Cawagub tahun 2005. Penelitian ini telah dilaksanakan melalui analisis kontent terhadap beberapa *Tajuk Rencana* pada beberapa edisi Harian Singgalang yang berkaitan dengan informasi (berita) Pilkada Cagub/ Cawagub tahun 2005.

³ Dalam Nimmo, Dan. 1993. *Ibid*.

B. Tinjauan Kepustakaan

Proses komunikasi dalam artikulasi politik antara lain dapat dilihat dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung yang sering disebut sebagai Pilkada langsung. Cagub/cawagub sebagai pihak “*siapa yang mengatakan apa*” akan berusaha sekuat tenaga untuk mempengaruhi rakyat agar memilih mereka. Sementara itu, rakyat sebagai pihak “*ditujukan kepada siapa dengan pengaruh yang bagaimana*” akan memilih gambar-gambar cagub/cawagub yang mereka anggap sanggup memperjuangkan nasibnya. Di sinilah surat kabar sebagai media komunikasi politik “*melalui media mana*” menyalurkan pesan-pesan politik cagub/cawagub tersebut pada semua kalangan.

Menurut Sudijono⁴ kelancaran komunikasi politik ini dipengaruhi oleh independensi surat kabar sebagai penyalur aspirasi, gagasan, pandangan-pandangan politik baik dari pemerintah maupun dari rakyat. Artinya, surat kabar seharusnya berpihak kepada “*semua*” tanpa memandang status dan kedudukan sosialnya. Intinya surat kabar tersebut hendaknya bukan “*menjilat*” kepada “*siapa*”, tetapi justru mengkritik “*semua*” yang tidak benar. Dengan demikian surat kabar haruslah bersikap independen, diberi kebebasan untuk bersuara seobjektif mungkin meliputi peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga semua pihak dapat menerima masukan dari semua kalangan.

⁴Sudijono, Sastro Atmojo. 1995. *Prilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.

Begitu juga pada saat berlangsungnya Pilkada, surat kabar dalam menyalurkan pesan-pesan politik cagub/cawagub sebagai pihak “*siapa yang mengatakan apa, ditujukan kepada siapa dengan pengaruh yang bagaimana*” dituntut untuk bersikap independen sehingga pesan-pesan politik para cagub/cawagub tersebut bisa dinilai oleh rakyat apakah hanya mewakili kepentingan kelompok dari partai politik mereka sendiri atau memperjuangkan aspirasi rakyat. Dengan adanya independen dari surat kabar, rakyat bisa lepas dari jerat-jerat manipulasi berupa janji-janji politik yang mempengaruhi pilihan mereka nantinya.

Di Sumatera Barat, salah satu surat kabar yang menyatakan diri sebagai surat kabar independen adalah *Harian Umum Singgalang*. Sejak pertama kali terbit pada tanggal 18 Desember 1968, surat kabar ini bertekad membawa pembaharuan untuk masyarakat dengan berpegang teguh kepada motto “*Harian Umum Independen, Membina Harga Diri Untuk Kesejahteraan Nusa Bangsa*”. Ini berarti independen tidak terikat atau dipengaruhi oleh partai politik, pemerintah dan golongan manapun.

Pada tataran lokal, *Harian Umum Singgalang* ini pada dasarnya juga berperan sebagai media komunikasi politik. Hal ini bisa dilihat pada awal pendiriannya, *Harian Umum Singgalang* langsung merebut hati masyarakat karena lebih mengutamakan informasi seputar rintangan yang ditimbulkan oleh berbagai pegolakan akibat tekanan dari pemerintahan Orde Lama. Hal ini berarti bahwa *Harian Umum Sing-*

galang tidak memihak kepada penguasa tetapi menyampaikan apa adanya kepada khalayak. Pada masa ini Harian Umum Singgalang layak menyandang status sebagai surat kabar yang independen.

Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya terjadi pasang surut terhadap status yang diemban oleh Harian Umum Singgalang ini. Pada masa Orde Baru surat kabar Harian Umum Singgalang terbukti “rela melepas” status independennya dengan “memihak” pada Golkar. Zunni⁵ dalam hasil penelitiannya tahun 2000 membuktikan bahwa Harian Umum Singgalang cenderung memihak Golkar dibandingkan parpol lainnya pada pemilu 1992 dan 1997.

Penelitian Zunni di atas menjadikan pesan-pesan politik di seputar Pemilu yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru sebagai objek kajiannya. Pada waktu Pemilu-Pemilu tersebut dilaksanakan, peneliti menemukan surat kabar mengalami “pemasangan” atau dipengaruhi oleh partai politik yang berkuasa dalam meliput pesan-pesan politik di seputar Pemilu tersebut sehingga kehilangan independensinya.

Untuk itu pada penelitian ini yang menjadi objek kajiannya adalah pesan-pesan politik di seputar Pilkada, terutama Pilkada cagub/cawagub tahun 2005, di Sumatera Barat yang diliput oleh Harian Umum Singgalang. Pada saat Pilkada 2005 tersebut surat kabar

termasuk Harian Umum Singgalang sudah mulai lepas dari “pemasangan” penguasa dengan runtuhnya Orde Baru. Hal ini ditandai dengan dicabutnya perturan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) ciptaan Orde Baru oleh Presiden BJ. Habibie.

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa pada saat Pilkada, terutama pada Pilkada cagub/cawagub pada tahun 2005, berlangsung di Sumatera Barat, surat kabar termasuk Harian Umum Singgalang kembali independen, bebas dan bertanggung-jawab menyampaikan pesan-pesan politik. Pesan-pesan politik yang disampaikan kembali bervariasi, mampu membentuk opini publik dalam memperkuat keyakinan-keyakinan politik individu atau masyarakat dalam memilih nantinya. Pesan-pesan politik tersebut tidak saja berasal dari salah satu cagub/cawagub tetapi juga berasal dari pesan-pesan politik para cagub/cawagub lainnya.

Dari kenyataan di atas, penelitian ini berusaha mengungkap independensi Harian Umum Singgalang dalam komunikasi politik pada Pilkada 2005 di Sumatera Barat. Menurut Malarangeng⁶ untuk mengetahui independensi surat kabar terhadap suatu masalah, apakah itu terhadap kebijaksanaan pemerintah ataupun terhadap aspirasi masyarakat yang sedang berkembang maka dapat dilihat dalam Tajuk Rencana. Independensi, sikap, pendirian atau pandangan itu adalah bersikap netral, mendukung ataupun bersikap tidak

⁵ Zunni, M. 2000. “Kecenderungan Harian Umum Singgalang Terhadap OPP dalam Kampanye Pemilu 1992 & 1997: Suatu Analisa Isi”. *Skripsi Sarjana FIS UNP: Padang*.

⁶ Malarangeng, Rizal. 1992. *Pers Orde Baru. Tinjauan Isi Harian Kompas dan Suara Karya*. Jakarta: Rajawali Pers.

mendukung terhadap cagub/cawagub tertentu saja. Dari Tajuk Rencana pembaca bisa mengetahui apakah surat kabar yang dibacanya teguh bersikap independen, berkiblat kepada kekuatan politik tertentu atau *plan* cari selamat.

Selain itu independensi surat kabar juga dapat dilihat dari keleluasaan editor dalam menulis Tajuk Rencana. Keleluasaan ini bisa dilihat dalam Tajuk Rencana apakah editor dalam menulis dipengaruhi atau tidak dipengaruhi. Tidak dipengaruhi yang dimaksud adalah kebebasan dari editor untuk mencurahkan ide, pikiran atau pendapatnya terhadap masalah yang diulasnya dalam Tajuk Rencana. Sedangkan dipengaruhi adalah dalam menulis Tajuk Rencana editor dalam mengulas tidak memihak siapapun terutama cagub/cawagub.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis Method*) dengan pendekatan deskriptif. Analisis isi deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan suatu pesan dalam teks dan memberi makna pada pesan yang terkandung di dalamnya untuk menggambarkan gejala sosial yang terjadi. Metode ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis atau menguji hubungan diantara variable. Jumlah teks yang dianalisis tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil penelitian.

Unit analisis dari penelitian ini adalah berita Pilkada dengan kategori independensi dan sub kategoris sikap dan keleluasaan. Sikap diukur dengan

alat ukur kategori: mendukung, netral dan tidak mendukung. Sedangkan keleluasaan diukur dengan kategori: dipengaruhi dan tidak dipengaruhi.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sesuai dengan tujuan penelitian yakni mendeskripsikan independensi Harian Umum Singgalang dalam komunikasi politik pada Pilkada 2005, maka independensi tersebut dilihat dalam Tajuk Rencana meliputi keleluasaan dengan alat ukur kategori “dipengaruhi atau tidak dipengaruhi”, sikap dengan alat ukur kategori “mendukung”, “netral”, dan “tidak mendukung”. Sampel yang diteliti adalah Tajuk Rencana yang dimuat Harian Umum Singgalang yang terbit pada waktu kampanye bertepatan Pilkada. Alasannya adalah karena pada masa kampanye tersebutlah pesan-pesan politik cagub/cawagub bermunculan dan sifatnya juga sudah resmi dari cagub/cawagub.

Kampanye Pilkada 2005 berlangsung tanggal 10 – 23 Juni 2005. Mengingat jumlah populasi terbatas maka seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Dengan asumsi Harian Umum Singgalang dalam Tajuk Rencananya selama masa kampanye selalu mengulas Pilkada, maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 14 eksemplar. Penghitungan ini berdasarkan jumlah hari kampanye yakni, 14 hari dari tgl 10 – 23 Juni 2005 sebagaimana terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Tajuk Rencana Terbit Pada Masa Kampanye Pilkada 2005

No	Hari/Tgl	Judul	Ket
1.	Jum'at/10-6	Kampanye dan Menghormati Proses Demokrasi	Sampel
2.	Sabtu/11-6	Soal <i>Illegal Loging</i> Hukum Harus Ditegakan	-
3.	Minggu/12-6	Tidak terbit	-
4.	Senin/13-6	Devisa, BBM dan Teror	-
5.	Selasa/14-6	Semarak Kampanye Pilkada	Sampel
6.	Rabu/15-6	Menunggu UU Inteljen	-
7.	Kamis/16-6	Bersihkan Semua Lembaga Pemerintahan Dari Korupsi	-
8.	Jum'at/17-6	Korupsi Dana Haji Mengagetkan	-
9.	Sabtu/18-6	Penting Menghormati Kampanye Kadidat	Sampel
10.	Minggu/19-6	Tidak terbit	-
11.	Senin/20-6	Kembalikan Mereka Yang Diduga Pelaku Ilegal Loging ke LP Muaro	-
12.	Selasa/21-6	Pelacur, Cukong dan Peranan Pimpinan Informal	-
13.	Rabu/22-6	<i>Black Campaign</i>	Sampel
14.	Kamis/23-6	BBM, Mahal Tak Bisa Di Beli	-

Sumber: Tajuk Rencana H.U Singgalang terbit tgl 10 s.d 23 Juni 2005 pada Pilkada 2005

Pada Tabel 1 di atas terlihat bahwa Harian Umum Singgalang dari 14 hari kampanye Pilkada hanya menerbitkan 12 Tajuk Rencana. Hal ini disebabkan karena pada hari Minggu Harian Umum Singgalang hanya khusus mengulas tentang budaya, adat, sastra, hiburan, terutama Budaya Minangkabau sehingga tidak mengulas Tajuk Rencana sebagaimana dikatakan Khairul Jasmi (Pemimpin Redaksi Singgalang) dalam wawancara pada tanggal 6 Desember 2012).

Setiap hari Minggu, Harian Umum Singgalang khusus me-

nerbitkan Edisi Minggu berisikan tentang budaya, adat, sastra, hiburan, terutama budaya Minangkabau. Hal ini sesuai dengan tekad Harian Umum Singgalang sejak berdirinya untuk ikut menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya di Minangkabau. Pada hari Minggu kami tidak menurunkan Tajuk Rencana, ini berlaku sampai sekarang setiap hari Minggu-nya.

Selanjutnya dari Tabel 1 di atas juga nampak bahwa dari 14 Tajuk

Rencana yang terbit pada masa kampanye Pilkada 2005, ada 4 Tajuk Rencana yang mengulas tentang

Pilkada sesuai dengan unit analisis yang ditetapkan sebagaimana terlihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Tajuk Rencana Bertemakan Pilkada Pada Kampanye Pilkada 2005

No	Hari/Tgl	Judul	Ket
1	Jum'at/10-6	Kampanye Dan Menghormati Proses Demokrasi	Sampel
2	Selasa/14-6	Semarak Kampanye Pilkada	Sampel
3	Sabtu/18-6	Penting, Menghormati Kampanye Kadidat	Sampel
4	Rabu/22-6	<i>Black Campaign</i>	Sampel

Sumber: Analisis Tajuk Rencana Harian Umum Singgalang bertemakan Pilkada, terbit tanggal 10 s.d 23 Juni 2005 pada Pilkada 2005

Dengan demikian sampel penelitian ini adalah 4 Tajuk Rencana pada masa Pilkada 2005. Hasil temuan penelitian di atas dibahas sesuai dengan tujuan penelitian yakni mendeskripsikan independensi Harian Umum Singgalang dalam Komunikasi Politik pada Pilkada 2005. Menurut Mallarangeng⁷ independensi surat kabar bisa dilihat dalam Tajuk Rencana. Dengan demikian Tajuk Rencana yang ditulis oleh editor bertujuan untuk menyatakan pendapat surat kabar tersebut mengenai masalah yang terjadi. Begitu juga dengan Harian Umum Singgalang sebagaimana dikatakan oleh Khairul Jasmi (Pimpred Singgalang) yakni:

Keberadaan kolom Tajuk Rencana dalam Harian Umum Singgalang tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Uraian Tajuk Rencana ini adalah mencakup permasalahan yang hangat dibi-

carakan. Isinya merupakan sikap atau pandangan yang ditujukan oleh Harian Umum Singgalang terhadap suatu peristiwa (Khairul Jasmi, hasil wawancara pada tanggal 6 Desember 2012).

Sikap Harian Umum Singgalang terhadap Tajuk Rencana Saat Pilkada 2005

Untuk mengetahui independensi Harian Umum Singgalang dalam komunikasi politik pada Pilkada 2005 di Sumatera Barat dapat dilihat dari orientasi informasi Tajuk Rencana yaitu apa yang menjadi tujuan utama dari penulisan Tajuk Rencana tersebut. Orientasi informasi ini dibagi ke dalam tiga kategori⁸, yaitu: 1) *Netral*, jika penulisan Tajuk Rencana ditujukan untuk memperjelas persoalan atau memperluas perspektif dalam melihat suatu masalah atau beberapa masalah. 2) *Mendukung*, jika penulisan Tajuk Rencana untuk menyetujui, menganjurkan atau men-

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

dukung pendapat, persoalan atau kecenderungan tertentu. 3) *Tidak mendukung*, jika penulisan Tajuk Rencana ditujukan untuk menentang, tidak sepakat atau menolak pendapat tertentu atau kecenderungan tertentu yang terjadi.

Temuan penelitian pada kategori sikap menunjukkan bahwa dari 4 Tajuk Rencana yang diterbitkan Harian Umum Singgalang selama kampanye Pilkada 2005,

keempat Tajuk Rencana tersebut bersikap netral. Artinya 4 Tajuk Rencana tersebut tidak ada memihak pada cagub/cawagub kontestan Pilkada 2005. Tetapi, dalam penulissannya justru memperjelas persoalan atau memperluas perspektif terhadap permasalahan yang timbul dan berkembang dalam kampanye Pilkada 2005 sebagaimana terlihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Independensi Harian Umum Singgalang Dalam Tajuk Rencana Pada Pilkada 2005 pada Kategori Sikap

No	Hari /Tgl	Judul	Sikap		
			F	N	U
1.	Jum'at/10-6	Kampanye Dan Menghormati Proses Demokrasi		N	
2.	Selasa/14-6	Semarak Kampanye Pilkada		N	
3.	Sabtu/ 18-6	Penting Menghormati Kampanye Kadidat		N	
4.	Rabu/ 22-6	<i>Black Campaign</i>		N	
Jumlah			0	4	0

Sumber: Analisis independensi Harian Umum Singgalang dalam Tajuk Rencana pada Pilkada 2005, Kategori Sikap

Seperti telah disebutkan sebelumnya tujuan dan metode yang digunakan, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis atau menguji hubungan diantara variabel tetapi untuk mendeskripsikan pesan dalam teks dan memberi makna pada pesan yang terkandung di dalamnya untuk menggambarkan gejala sosial yang terjadi. Dalam hal ini adalah independensi surat kabar dalam Tajuk Rencana dengan kategori sikap. Jumlah teks yang dianalisis tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil penelitian. Di bawah ini akan di bahas sikap Harian Umum

Singgalang dalam komunikasi politik pada Pilkada 2005 di Sumatera Barat .

Tajuk Rencana yang diterbitkan selama kampanye Pilkada 2005 di Sumatera Barat. Tajuk Rencana yang berjudul “Kampanye dan Menghormati Proses Demokrasi” terbit hari Jum’at tanggal 10 Juni 2005, sikap Harian Umum Singgalang netral yakni memperjelas persoalan kampanye yang menghormati proses demokrasi, seperti dikutip berikut ini.

Dalam pelaksanaan kampanye dilarang, mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UU 1945. Dilarang meng-

hina seseorang, agama, suku, ras, calon kepala daerah atau partai politik. Tidak boleh menghasut atau mengadudomba partai politik, perseorangan atau kelompok masyarakat. Dilarang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada, perorangan atau kelompok masyarakat atau partai politik ... dengan demikian, aturan sudah cukup memberikan arahan terhadap kampanye Pilkada dan semua pihak apakah masyarakat, tim sukses maupun para pendukung sudah ada pegangan masing-masing.

Dari cuplikan Tajuk Rencana di atas nampak bahwa Harian Umum Singgalang menjalankan komunikasi politik, dimana penulis bersikap netral dengan memperjelas persoalan tentang kampanye yang mendukung proses demokrasi. Di sini nampak surat kabar Harian Umum Singgalang menyampaikan informasi pada masyarakat tentang pelaksanaan kampanye yang diharapkan oleh pemerintah dan semua pihak agar Pilkada tersebut berjalan lancar.

Dengan demikian mengalirnya informasi melalui masyarakat dan berbagai struktur yang ada dalam sistem politik berjalan dengan baik. Sebab, menurut Harmoko⁹ komunikasi politik berfungsi sebagai penghubung antara situasi kehidupan politik yang ada pada suprastruktur politik dengan infrastruktur politik

⁹ Rauf, Maswadi dan Mappa Nasrun. 1993. *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta: Gramedia.

yang dapat dipakai untuk menciptakan kondisi kehidupan politik yang stabil.

Begitu juga dalam Tajuk Rencana yang berjudul “Penting Menghormati Kampanye Kadidat” terbit hari Sabtu tanggal 18 Juni 2005, sikap Harian Umum Singgalang juga netral yakni memperjelas persoalan tentang memilih kepala daerah harus memperhatikan visi dan misi para kandidat-kandidat tidak terpengaruh oleh bujukan atau rayuan. Selengkapnya dapat dilihat pada cuplikan di bawah ini.

Berangkat dari harapan besar untuk kemajuan daerah dan kebaikan untuk masyarakat, cermatilah kampanye kandidat, diskusikanlah oleh masyarakat sehingga lahirilah pilihan sesuai hati nurani. Rayuan, ataupun kalau ada bujukan dengan suatu pemberian dalam bentuk uang dan sebagainya, diharapkan tidak akan menggeser hati nurani ... karena itu cermatilah visi dan misi serta materi kampanye maupun latar belakang dan kepemimpinan para kandidat selama ini di Sumbar, disitulah pilihan akan dijatuhkan.

Di sini nampak bahwa surat kabar Harian Umum Singgalang berperan sebagai alat komunikasi politik dengan menciptakan opini publik (*publik opinion*) yang membangun persepsi masyarakat menjadi positif terhadap proses Pilkada yang mendukung proses demokrasi. Jadi surat kabar Harian Umum Sing-

galang tidak hanya berperan sebagai sumber informasi, medium pendidikan, hiburan dan pengamat lingkungan, tetapi juga sebagai media komunikasi politik.

Selanjutnya dalam Tajuk Rencana yang berjudul “*Black Campaign*” terbit hari Rabu tanggal 22 Juni 2005, Harian Umum Singalang juga bersikap netral dengan cara memperjelas masalah *Black Campaign* yang muncul pada kampanye Pilkada 2005 merupakan cara yang menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan seperti yang terlihat dalam cuplikan di bawah ini.

Berkemungkinan black Campaign ini akan berlanjut terus sampai menjelang detik-detik pemungutan suara. Sebab, saat-saat yang menentukan itu, fikiran pemilih harus di ubah oleh pihak-pihak yang tidak suka bermain fair dan tidak jujur, guna mencapai kemenangan dengan segala cara. Bagi kelompok ini apapun cara-nya adalah halal, asalkan menang dalam Pilkada.

Dari cuplikan di atas penulis Tajuk Rencana berusaha mendorong daya pikir pembaca atas masalah yang sedang dihadapi. Pembaca diajak untuk berbincang-berbincang tentang *Black Campaign*, kemudian dipersilahkan menyimpulkan sendiri tanpa berpihak pada salah satu cagub/cawagub ataupun pihak yang melakukan *Black Campaign*. Di sini penulis mengajak pembacanya merenung dan berpikir, berusaha mempengaruhi dan meyakinkan para

pembaca untuk terus waspada terhadap kelompok yang berbuat *Black Campaign*. Sebab bagi kelompok ini apapun caranya adalah halal, asalkan menang dalam Pilkada.

Sedangkan pada Tajuk Rencana yang terbit pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2005 dengan judul “Semarak Kampanye Pilkada” penulisnya dipengaruhi oleh pendapat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar H. Antasari Azhar, SH.MH yakni:

Apa yang diingatkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar H. Antasari Azhar, SH.MH, bahwa bentuk reaksi dan gejolak dalam kampanye Pilkada hendaknya dapat dilihat dengan jernih dan kepala dingin. Pernyataan Kajati Sumbar patut kita catat sebagai peringatan bagi semua pihak...

Tetapi dalam ulasannya tidak ada memihak kepada salah satu kandidat Pilkada 2005. Justru di dalam ulasannya penulis memperluas perspektif terhadap semaraknya Pilkada, seperti dapat dilihat dalam kutipan berikut.

Tahapan ini oleh para kandidat maupun para juru kampanye dimaksudkan untuk menarik massa calon pemilih sebanyak-banyaknya. Semakin besar daya tarik sosok kandidat, semakin besar pula kemungkinan para calon pemilih menentukan pilihan padanya. Upaya menarik simpati dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan penyampaian visi-misi serta program yang akan dilaksanakan jika terpilih.

Keleluasaan Editor Tajuk Rencana Dalam Mengulas Peristiwa Kampanye Pilkada 2005

Selain sikap dalam Tajuk Rencana independensi surat kabar juga dapat dilihat dari keleluasaan penulis apakah dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh pihak manapun terutama cagub/cawagub. Keleluasaan dalam pembahasan ini maksudnya adalah bahwa penulis atau editor yang menulis tajuk harus dalam keadaan tidak dipengaruhi oleh pihak mana pun, termasuk pendapat tertentu sehingga tidak memberikan pengaruh buruk terhadap suatu peristiwa yang dibahas.

Editor harus memiliki keleluasaan menyampaikan pandangannya. Sebab, Tajuk Rencana adalah satu-satunya karangan dalam surat kabar untuk menyatakan sikapnya. Dapat dikatakan bahwa penulis Tajuk Rencana harus memiliki keleluasaan

atau diberikan kesempatan untuk mengemukakan pikirannya yang mencerminkan apa yang terasa oleh hati nurani masyarakat bukan dipengaruhi oleh pihak manapun sehingga tidak memberikan pengaruh buruk terhadap suatu peristiwa.

Temuan penelitian pada kategori keleluasaan menunjukkan bahwa dari 4 Tajuk Rencana yang diterbitkan Harian Umum Singgalang selama kampanye Pilkada 2005, tiga Tajuk Rencana dalam penulisannya tidak dipengaruhi oleh pihak tertentu terutama cagub/cawagub kontestan Pilkada. Ketiga Tajuk Rencana tersebut mencerminkan keleluasaan dari editor dalam memuat pandangan-pandangan redaksi Harian Umum Singgalang terhadap persoalan-persoalan yang berkembang dalam kampanye Pilkada sebagaimana terlihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4
Independensi Harian Umum Singgalang dalam Tajuk Rencana pada Pilkada 2005 pada Kategori Keleluasaan

No	Hari /Tgl	Judul	Keleluasaan	
			tdp	dp
1.	Jum'at/10-6	Kampanye Dan Menghormati Proses Demokrasi	tdp	
2.	Selasa/14-6	Semarak Kampanye Pilkada		dp
3.	Sabtu/ 18-6	Penting Menghormati Kampanye Kadidat	tdp	
4.	Rabu/ 22-6	Black Campaign	tdp	
Jumlah			3	1

Sumber: Analisis independensi Harian Umum Singgalang dalam Tajuk Rencana pada Pilkada 2005 Kategori Keleluasaan

Pada Tabel di atas tampak, dari 4 Tajuk Rencana yang diterbitkan oleh Harian Umum Singgalang selama kampanye Pilkada 2005, tiga Tajuk Rencana dalam penulisannya tidak

dipengaruhi oleh pihak tertentu terutama cagub/cawagub kontestan Pilkada. Ketiga Tajuk Rencana tersebut mencerminkan keleluasaan dari editor Harian Umum Singgalang

dalam memuat pandangannya terhadap persoalan-persoalan yang berkembang dalam kampanye Pilkada 2005. Pada Tajuk Rencana terbit pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2005 dengan judul “Semarak Kampanye Pilkada”, editor Tajuk Rencana dipengaruhi oleh pendapat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar H. Antasari Azhar, SH.MH sebagaimana terlihat dalam cuplikan Tajuk Rencana tersebut yakni:

Apa yang diingatkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar H. Antasari Azhar, SH.MH, bahwa bentuk reaksi dan gejala dalam kampanye Pilkada hendaknya dapat dilihat dengan jernih dan kepala dingin. Pernyataan Kajati Sumbar patut kita catat sebagai peringatan bagi semua pihak...

Di bawah ini akan dibahas keleluasaan editor Tajuk Rencana Harian Umum Singgalang dalam komunikasi politik pada Pilkada 2005 di Sumatera Barat dalam Tajuk Rencana yang diterbitkannya selama kampanye. Pada Tajuk Rencana yang berjudul “Kampanye Dan Menghormati Proses Demokrasi” terbit hari Jum’at tanggal 10 Juni 2005, tercermin bahwa penulis Tajuk Rencana surat kabar Harian Umum Singgalang tidak dipengaruhi oleh pihak tertentu, dalam penulisannya editor memiliki keleluasaan dalam menyampaikan pandangannya terhadap kampanye yang harus menghormati proses demokrasi, seperti terlihat dalam kutipan di bawah ini.

Kampanye bisa diartikan sebagai sosialisasi. Membuat masyarakat akan lebih kenal dan menetapkan keputusan masing-masing, memilih atau tidak memilih pasanganyang tampil ke pentas Pilkada.

Demokrasi menghormati hak siapapun untuk menyalurkan serta menetapkan pilihannya sesuai hati nurani. Tidak boleh ada paksaan dari siapapun. Karena itu kampanye harus berjalan dengan aman dan lancar. Tidak boleh ada bentrok, karena hal itu merusak tatanan demokrasi yang kita idam-idamkan saat ini. Selamat berkampanye dan mari semua orang menghormati proses demokrasi itu sebagaimana mestinya.

Dari cuplikan Tajuk Rencana yang ditulis di atas nampak bahwa editor memamparkan bagaimana kampanye harus dilakukan yakni harus menghormati demokrasi dan sesuai dengan aturan. Menurut Prihatmoko¹⁰ pada umumnya, kampanye politik diatur dengan peraturan-peraturan tersendiri yaitu waktu, tata caranya, pengawasan dan sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran oleh penyelenggaraan kampanye.

Dengan demikian nampak editor dalam menulis Tajuk Rencana memiliki keleluasaan dalam menyam-

¹⁰Prihatmoko, Joko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

paikan bagaimana seharusnya kampanye itu dilakukan. Kampanye politik adalah kegiatan yang bersifat formal dalam sebuah perebutan jabatan-jabatan politik tertentu. Pelaksanaan kampanye dalam Pilkada dilakukan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program para pasangan calon. Untuk itu *Harian Umum Singgalang* memajukan independensi dalam komunikasi politik dengan mengulas tentang kampanye dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun terutama cagub/cawagub.

Menurut Prihatmoko¹¹ kampanye adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari rakyat. Dalam kampanye politik, biasanya semua bentuk komunikasi politik dikembangkan seperti agitasi politik, propaganda politik, *public relations* politik, dan retorika politik. Dalam komunikasi politik pada kampanye Pilkada inilah surat kabar sering dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) Pilkada.

Lebih lanjut Prihatmoko¹² mengatakan surat kabar dimanfaatkan oleh *stakeholder* untuk beberapa kepentingan. *Pertama*, menjadikan surat kabar sebagai komunikasi langsung dari pasangan calon kepala daerah kepada masyarakat pemilih. Dalam hal ini surat kabar dipakai sebagai alat promosi untuk memperkenalkan pasangan calon kepala daerah. Contoh pada saat menjelang

hari pemilihan banyak gambar yang telah dipampangkan di surat kabar dari setiap calon kepala daerah. *Kedua*, surat kabar dimanfaatkan sebagai program berita (informasi khusus). Dalam hal ini surat kabar memberitakan tentang calon dan segala hal yang menyangkut pemilu dan membangun citra positif terhadap pasangan calon kepala daerah. *Ketiga*, surat kabar berperan sebagai sarana sosialisasi Pilkada atau informasi pendidikan untuk pemilih. Informasi ini menyangkut partisipasi pemilih, proses pemilihan, cara memilih dan lain sebagainya.

Dalam kaitannya surat kabar dimanfaatkan oleh *stakeholder* komunikasi politik, nampak bahwa surat kabar mengambil posisi pada point ketiga. Hal ini terlihat dalam Tajuk Rencana yang berjudul "Penting Menghormati Kampanye Kadidat" terbit hari Sabtu tanggal 18 Juni 2005. Penulis Tajuk Rencana surat kabar memiliki keleluasaan dalam menyampaikan pandangannya terhadap kandidat-kandidat cagub/cawagub dalam kampanye Pilkada 2005, seperti tergambar dalam kutipan berikut.

Siapa pilihan kita? Berangkat dari harapan besar untuk kemajuan daerah dan kebaikan untuk masyarakat, cermatilah kampanye kandidat, diskusikanlah oleh masyarakat sehingga lahirilah pilihan sesuai hati nurani. Rayuan, ataupun kalau ada bujukan dengan suatu pemberian dalam bentuk uang dan sebagainya, diharapkan tidak akan menggeser hati

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

nurani...karena itu cermatilah visi dan misi serta materi kampanye maupun latar belakang dan kepemimpinan para kandidat selama ini di Sumbar, di situlah pilihan akan dijatuhkan.

Selanjutnya dalam Tajuk Rencana yang berjudul “*Black Campaign*” terbit hari Rabu tanggal 22 Juni 2005, penulis Tajuk Rencana surat kabar memiliki keleluasaan dalam menyampaikan pandangannya terhadap masalah *Black Campaign* yang muncul pada kampanye Pilkada 2005, seperti terlihat dalam kutipan berikut.

Ternyata hal yang kita cemaskan itu terjadi juga. Kampanye yang menjelek-jelekan lawan (Black Campaign) bermunculan ...banyak cara yang dipakai untuk Black Campaign itu. Mulai dari menebar isu korupsi, kolusi, dan nepotisme, sampai kepada soal pribadi, ketaatan beragama, serta sejumlah kasus pidana yang ditebar melalui SMS, maupun surat kaleng dan sebagainya. Memang tidak dilakukan oleh kandidat, tetapi oleh pihak-pihak yang mungkin pendukung kandidat tertentu.

Menurut Koeswara¹³, fungsi Tajuk Rencana adalah untuk mendorong daya pikir pembaca dan mengajaknya berbincang-bincang tentang sesuatu sebelum pendapat umum (*public opinion*) mengenai sesuatu itu terbentuk. Di sini nampak bahwa

¹³Koeswara, FX, (et.al.). 1994. *Dibalik Tugas Kuli Tinta*. Sebelas Maret University, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.

pada Tajuk Rencana yang ditulis oleh redaksi surat kabar Harian Umum Singgalang dengan judul “*Black Campaign*” terbit hari Rabu tanggal 22 Juni 2005 editor menyatakan pendapat mengenai masalah “*Black Campaign*” yang terjadi. Di sini editor bebas untuk mengemukakan pikirannya dengan tidak ikut-ikutan memberitakan hal yang buruk pada pihak yang terlibat tetapi menyampaikan sesuai dengan hati nurani masyarakat bukan dipengaruhi oleh pihak manapun sehingga tidak memberikan pengaruh buruk terhadap suatu peristiwa

Dari ketiga Tajuk Rencana yang diterbitkan oleh Harian Umum Singgalang dapat dikatakan bahwa penulis Tajuk Rencana memiliki keleluasaan atau diberikan kesempatan untuk mengemukakan pikirannya yang mencerminkan apa yang terasa oleh hati nurani masyarakat pada kampanye Pilkada 2005, jika penulisan dipengaruhi oleh pihak tertentu apa lagi pendapat cagub/cawagub yang merupakan salah satu pesan politik untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya. Tetapi pada Tajuk Rencana yang terbit pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2005 dengan judul “Semarak Kampanye Pilkada” nampak bahwa penulis Tajuk Rencana dipengaruhi oleh pihak tertentu, seperti terlihat dalam kutipan berikut.

Apa yang diingatkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar H. Antasari Azhar, SH.MH, bahwa bentuk reaksi dan gejala dalam kampanye Pilkada hendaknya dapat dilihat dengan

jernih dan kepala dingin. Pernyataan Kajati Sumbar patut kita catat sebagai peringatan bagi semua pihak...

Dari cuplikan Tajuk Rencana di atas nampak bahwa penulis dalam ulasannya dipengaruhi oleh pendapat orang lain yakni Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar H. Antasari Azhar, bukan pendapatnya sendiri mengenai semaraknya kampanye Pilkada 2005 sehingga memberikan kesan buruk pada semaraknya kampanye seorang kandidat. Paparan tersebut terlihat pada ulasan berikutnya, yakni:

Ratusan sampai ribuan massa yang memadati gedung pertemuan atau lapangan tempat kampanye dilaksanakan belum-lah dapat dijadikan sebagai jaminan bahwa kandidat bersangkutan akan dipilih.

Fungsi Tajuk Rencana adalah untuk mendorong daya pikir pembaca dan mengajaknya berbincang-bincang tentang sesuatu sebelum pendapat umum (*public opinion*) mengenai sesuatu itu terbentuk¹⁴. Di sini nampak Tajuk Rencana yang ditulis oleh redaksi surat kabar Harian Umum Singgalang dengan judul “Jangan Tergoda Uang”, editor menyatakan pendapat mengenai masalah “Politik Uang” yang terjadi. Di sini editor bebas untuk mengemukakan pikirannya tentang bahaya atau dampak yang ditimbulkan oleh “Politik Uang”.

¹⁴ *Ibid*

Dalam komunikasi politik salah satu fungsi Tajuk Rencana adalah untuk mendorong daya pikir pembaca dan mengajaknya berbincang-bincang tentang sesuatu sebelum pendapat umum (*public opinion*) mengenai sesuatu itu terbentuk. Dalam Tajuk Rencana editor menawarkan suatu jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang terjadi bukan membentuk opini yang negatif. Untuk itu penulis Tajuk Rencana haruslah seorang yang memiliki wawasan yang luas terhadap permasalahan yang akan diulas sebagaimana yang dikatakan oleh Khairul Jasmi (Pemimpin Redaksi Singgalang), yakni:

Penulis kolom Tajuk Rencana, khususnya pada Harian Umum Singgalang tidak dapat dilakukan oleh sembarang wartawan. Mengingat, kolom Tajuk Rencana ini bersifat memberikan analisa atau penjelasan terhadap persoalan yang sangat menonjol dalam masyarakat. Mengingat kajiannya sangat mendalam dalam penulisannya maka, diperlukan keahlian dan pemikiran intelektual untuk memaparkan dan menganalisa masalah dari berbagai sudut pandang. (Khairul Jasmi, hasil wawancara pada tanggal 6 Desember 2012).

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa penulis Tajuk Rencana haruslah dalam keadaan tidak dipengaruhi oleh pihak mana pun, walaupun dalam pertimbangannya, editor mendukung pendapat seseorang. Ini berarti bahwa mengulas

pendapat seseorang untuk memperjelas persoalan tidak mempengaruhi independensi, selama pendapat yang diulas tersebut tidak bermaksud untuk mendukung kandidat tertentu dalam kampanye. Untuk itu editor Tajuk Rencana haruslah memiliki keleluasaan atau diberikan kesempatan untuk mengemukakan pikirannya yang mencerminkan apa yang terasa oleh hati nurani masyarakat bukan dipengaruhi oleh pihak tertentu seperti pejabat ataupun tokoh masyarakat apa lagi cagub/cawagub.

E. Penutup

Berdasarkan analisis isi pada Tajuk Rencana Harian Umum Singgalang yang terbit pada masa kampanye Pilkada 2005 di Sumatera Barat dapat dikatakan Harian Umum Singgalang independen sebagai media komunikasi politik. Hal ini bisa dilihat pada:

Pertama, dalam penulisan Tajuk Rencana editor tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, terutama cagub/

cawagub, tetapi memiliki keleluasaan untuk menyampaikan pandangan, ide, dan pendapatnya terhadap masalah yang diulas. Walaupun dalam penulisan penulis mendukung pendapat seseorang tetapi hanya bermaksud untuk memperjelas persoalan tidak untuk mendukung kandidat tertentu dalam kampanye Pilkada sehingga tidak mempengaruhi independensinya.

Kedua, dalam mengulas suatu permasalahan yang timbul saat kampanye, Harian Umum Singgalang bersikap netral dengan memperjelas dan memperluas perspektif masyarakat terhadap persoalan.

Ketiga, diharapkan Harian Umum Singgalang untuk terus tetap menjaga dan mempertahankan independensinya jangan sampai terpengaruh oleh pihak tertentu terutama pemerintah dan partai politik yang berkuasa sebagaimana pernah terjadi pada masa Orde Baru.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Effendy, Onong Achjana. 2004. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Koeswara, FX, (et.al.). 1994. *Dibalik Tugas Kuli Tinta*. Sebelas Maret University, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Malarangeng, Rizal. 1992. *Pers Orde Baru. Tinjauan Isi Harian Kompas dan Suara Karya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nimmo, Dan. 1993. *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Prihatmoko, Joko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rauf, Maswadi dan Mappa Nasrun. 1993. *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Sudijono, Sastro Atmojo. 1995. *Prilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Zunni. M. 2000. "Kecenderungan Harian Umum Singgalang Terhadap OPP dalam Kompanye Pemilu 1992 & 1997: Suatu Analisa Isi". *Skripsi Sarjana FIS UNP: Padang*.